

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan pada semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk memperkuat ketahanan nasional.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan, memerlukan peran serta dari seluruh masyarakat agar tujuan pembangunan yang dicita-citakan dapat segera terwujud. Namun keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat.

Penduduk termasuk didalamnya kaum wanita, adalah salah satu modal dasar pembangunan nasional adalah faktor pendukung yang penting pula. Salah satu faktor yang memberikan gambaran potensi kaum wanita adalah jumlah penduduk wanita yang jauh lebih besar dibanding penduduk pria.

Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembangunan, baik itu laki-laki maupun wanita. Keikutsertaan kaum wanita dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini dirasakan semakin penting, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia terdiri dari

wanita yang merupakan tenaga kerja potensial, baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pegawai pemerintah, swasta maupun ibu rumah tangga.

Disamping itu adanya jaminan hak dan kewajiban yang sama antara pria dan wanita dalam bidang hukum dan pemerintahan menurut UUD 1945, seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, sebagai berikut:

Segala warga negara bersamaan hak dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tidak ada kecualinya.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antar hak dan kewajiban, tidak ada deskriminasi diantara warga negara baik mengenai hak maupun kewajibannya. Seperti diketahui, bahwa pembangunan nasional meliputi segala bidang, termasuk didalamnya pembangunan dibidang politik. Adapun sasaran pembangunan di bidang politik adalah pembaharuan kehidupan politik, baik infrastruktur politik maupun suprastruktur politik yang kesemuanya ini dilaksanakan tidak lain adalah untuk mewujudkan demokrasi, agar rakyat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Siti Aisyah mengkaji mengenai wanita sebagai sumber daya insani haruslah dimulai dengan mendudukan mereka sebagai manusia secara utuh, makhluk yang memiliki superprioritas disamping inferioritas, dengan bertumpu pada sudut pandang kemanusiaan, akan dapat dilihat bahwa laki-laki dan wanita

pada dasarnya sama cerdas otaknya, punya fitrah beragama, dimuliakan Allah swt, punya fungsi khalifah dan sama punya program hidup.<sup>1</sup>

Wanita dalam masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan dan pada kenyataannya sekarang ini telah banyak kaum wanita yang berperan dalam bidang tersebut. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah wanita yang menjadi anggota Badan Perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan bahkan telah banyak yang terjun langsung di dunia politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel Jumlah Wanita di DPR RI Periode Tahun 1950-2004**

Periode	Jumlah			
	perempuan	Persentase	Laki-laki	Presentase
1950-1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955-1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante: 1956-1959	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,8	460	92,2
1977-1982	29	6,3	460	93,7
1982-1987	39	8,5	460	91,5
1987-1992	65	13,0	500	87,0
1992-1997	65	12,5	500	87,5
1997-1999	54	10,8	500	89,2
1999-2004	45	9,0	500	91,0

Sumber: Sekretariat DPR, 2001, data dirumuskan ulang oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2002.]

<sup>1</sup> Dr. Hj. Binar, *Wacana Perempuan Dalam KeIndonesiaan dan Kemoderenan*, PT. Pustaka Cidesindo Bekerjasama Dengan UII, Jakarta, 1998, hal 285

Selain di Dewan Perwakilan Rakyat, wanita juga banyak terlibat dalam organisasi publik lainnya. Dimana jumlah mereka dalam setiap periodenya mengalami peningkatan. Walaupun jika dilihat perbandingan antara jumlah pria dan wanita sangat jauh berbeda. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2, Jumlah Pria dan Wanita yang bekerja di sektor publik tahun 2004**

Pekerjaan	Jumlah Wanita	Persentase	Jumlah Pria	persentase
MPR	18	9,2	117	90,8
DPR	44	8,8	455	91,2
MA	7	14,8	40	85,2
BPK	0	0	7	100
DPA	2	4,4	43	95,6
KPU	2	18,1	9	81,9
Gubernur	0	0	30	100
Walikota/Bupati	5	1,5	331	98,5
Eslon	1.883	7,0	25.110	93,0
Hakim	536	16,2	2.775	83,3
PTUN	35	23,4	150	76,6

Sumber: Data dirumuskan oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2001

Dari kedua tabel diatas, jumlah wanita yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di DPR pusat maupu DPRD (daerah) pada setiap perioedenya mengalami pasang surut. Perbandingan jumlah pria dan wanita yang bekerja disektor publik masih jauh berbeda, hal ini semakin menunjukkan bahwa peran wanita untuk berpartisipasi dibidang politik dan pemerintahan sangat dan semakin diperlukan.

Dalam terminologi barat, partisipasi politik dilakukan dengan memilih pimpinan negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Menurut Mariam Budiarjo partisipasi politik dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti, memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok

kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen lainnya.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk partisipasi politik seperti yang disebutkan diatas, dapat dilakukan oleh wanita sebagai perwujudan partisipasi aktifnya dalam kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota salah satu organisasi wanita, organisasi sosial kemasyarakatan, aktif menghadiri rapat organisasi dan rapat-rapat yang bersifat umum, dan lain sebagainya.

Peranan wanita dalam pembangunan, tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini terlihat bahwa tradisi yang diwariskan masyarakat pada umumnya memposisikan wanita pada sifat kewanitaannya saja, yang bersikap memelihara, melindungi, lebih menetap dan mengawetkan (konservasi), pasif terhadap kondisi sekitarnya, emosional dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dicirikan dengan senantiasa memegang inisiatif; Sifatnya progresif, dan hampir selalu memberikan stimulasi, lebih rasional, agresif, dan lebih aktif.<sup>3</sup> Dengan demikian sangat wajar bila wanita hidup dalam rumah tangga, memelihara anak, memberi perhatian pada suami agar rumah tangga hidup tenang dan sejahtera. Sedangkan laki-laki keluar untuk mencari nafkah.

Pembagian kerja secara seksual seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi wanita dalam melakukan perannya disegala bidang kehidupan termasuk kehidupan politiknya, hal ini tentunya perlu diluruskan karena pada dasarnya perbedaan itu lebih disebabkan faktor social ekonomi. Dengan demikian, dalam

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, PT. Gramedia, Jakarta 1982, hal 1

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 19

melihat peranan dan aktifitas wanita sewajarnya tidak lagi didasarkan pada sifat kewanitaannya saja, yang sampai sekarang masih diyakini atau dijadikan nilai-nilai dalam masyarakat, yaitu wanita hanya bertugas mengurus anak dan keperluan rumah tangga serta melayani suami.

Anderan Margaret L dalam buku *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan* yang ditulis oleh Hj. Binar menyebutkan bahwa:

“Seharusnya kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut dengan istilah *gender stratification* atau tatanan hierarkis yang menempatkan status perempuan dalam posisi subordinasi atau tidak persis sejajar dengan posisi laki-laki. Tatanan hierarkis demikian antara lain ditandai dengan kesenjangan ekonomi (perbedaan akses memperoleh sumber-sumber ekonomi) sekaligus kesenjangan politik (perbedaan akses memperoleh peran politik). Apabila dibandingkan dengan wanita, laki-laki memperoleh akses lebih besar pada sumber-sumber ekonomi dan politik, karena itu menjadi mudah dimengerti apabila kemudian menempatkan sebagian sebagian laki-laki pada puncak strata.<sup>4</sup>

Apabila disimak perjalanan politik dalam seperempat abad terakhir ini sebenarnya sudah melibatkan peran serta wanita, pada teras kepengurusan partai politik terdapat nama Megawati, Siti Hardiyanti Rukmana dan Aisyah Amini. Saat ini keikutsertaan wanita dalam kegiatan politik memang sangat diperlukan untuk menunjang program pembangunan. Sebagai tenaga potensial, wanita juga mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Isbodrini Suyanto, mengatakan bahwa:

“Wanita yang jumlahnya lebih besar dari kaum pria sesungguhnya merupakan faktor potensial dalam pembangunan. Mereka harus diikutsertakan dalam program ini. Beruntunglah wanita Indonesia karena pemimpin orde baru memberikan perhatian yang demikian besar pada wanita. Presiden Soeharto selalu menekankan pentingnya peranan wanita dalam pembangunan bangsa. Hal ini terbukti dengan adanya seorang

---

<sup>4</sup> Dr. Hj. Binar, *Op.Cit*, hal 41

Menteri Peranan Wanita yang akan melakukan kebijaksanaan tentang wanita kerangka pembangunan nasional. Jelaslah bahwa disini partisipasi wanita dalam segala bidang diperlukan dalam rangka menyampaikan aspirasi-aspirasinya itu. Sarana untuk melakukan hal ini antara lain adalah partisipasi dalam bidang politik yang tercermin antara lain dalam lembaga-lembaga perwakilan.<sup>5</sup>

Para ilmuan politik sebagian besar berpendapat bahwa tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan status social ekonomi seseorang diyakini mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi politiknya, semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan dan status sosial seseorang maka tingkat partisipasi politiknya akan semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan, pendapatan dan status sosial seseorang maka semakin rendah pula tingkat partisipasi politiknya. Jadi, baik laki-laki maupun wanita apabila ditunjang oleh faktor pendidikan, pendapatan dan status sosial yang tinggi memungkinkan mereka untuk aktif dalam kehidupan politik sesuai dengan keinginannya sendiri atau relatif otonom dalam pengambilan keputusan politiknya.

Menurut Abdul Munir Mul Khan partisipasi pendidikan wanita juga semakin meningkat dan meluas. Jika semula terbatas dalam melembagakan pendidikan yang langsung berhubungan dengan profesi dan fungsi tradisional wanita sebagai ibu seperti SPG dan IKIP, kini mereka juga mulai memasuki berbagai disiplin ilmu non keguruan di berbagai universitas, kecendrungan ini merupakan basis struktural dan kultural peran wanita dalam segala bidang

---

<sup>5</sup> Isbodroini Suyanto, *Partisipasi Wanita Dalam Politik*, 1990, hal 29

kehidupan mulai yang lebih luas yang mulai menempati posisi eksekutif, bisnis, politik dan lembaga ilmiah.<sup>6</sup>

Sementara itu, keikutsertaan kaum wanita dalam suatu organisasi, baik itu organisasi sosial kemasyarakatan ataupun organisasi politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politiknya, dimana interaksinya didalam suatu organisasi tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian maka individu yang menjadi anggota organisasi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan mereka capai. Anggota organisasi tersebut memiliki perbedaan satu sama lain baik tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini akan melahirkan pengalaman yang berbeda pula dari individu tersebut. Selain itu keaktifan, kedudukan serta organisasi yang diikuti merupakan pengalaman dari individu sedikit banyak mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Seseorang yang terjun dalam suatu organisasi sosial menunjuk pada tindakan manusia yang saling ketergantungan, dimana sewaktu seseorang mengadakan interaksi didalam dirinya akan timbul harapan serta pertimbangan. Jika interaksi itu berlangsung terus untuk suatu jangka waktu tertentu maka sedikit banyak akan timbul secara nyata pola-pola tingkah laku. Dengan timbulnya pola-pola tingkah laku tersebut maka akan membawa pengaruh terhadap partisipasi politiknya.

---

<sup>6</sup> Dr. Hj. Binar, *Op.Cit*, hal 285



Berikut ini disajikan pula data mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2004, mengenai jumlah penduduk Kota Yogyakarta beserta jumlah pemilih di Kota.

**Tabel 3, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih di Kota Yogyakarta Berdasarkan Hasil KPU dan Olah Cepat**

Jumlah Penduduk			Jumlah Pemilih			Persentase
KPU-KL	Olah Cepat	Selisih	KPU-KL	Olah Cepat	Selisih	
3.232.203	3.209.405	22.798	2.435.192	2.400.847	34.345	75,34%

Sumber: www.KPU.go.id

Dari data-data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Yogyakarta cukup besar yang memiliki hak pilih sehingga diharapkan juga sangat aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum, terutama bagi wanita.

Wanita sama halnya dengan laki-laki, yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan umum dapat dikatakan berpartisipasi dalam bidang politik, karena melalui kegiatan-kegiatan ini kebutuhan dan kepentingannya dapat tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan oleh wakil-wakil yang dipilihnya dan juga suaranya itu dapat mempengaruhi tindakan-tindakan wakil mereka untuk membuat keputusan yang mengikat.

Almond mengemukakan bahwa: "Pendidikan mempunyai pengaruh majemuk terhadap kompetensi politik. Bukan saja individu dengan pendidikan tinggi disekolah mempelajari keterampilan yang relevan dibidang politik, tetapi ia pun lebih mungkin memasuki hubungan non politik yang meningkatkan kadar kompetensi politiknya. Keanggotaan perserikatan merupakan salah satu bentuk

partisipasi non politik seperti itu. Dengan demikian keanggotaan pada organisasi non politik pun akan mempengaruhi sikap politik seseorang.”<sup>7</sup>

Dilihat dari sejarah pergerakan wanita Indonesia dalam bidang politik, ternyata wanita Indonesia cukup tinggi keterlibatannya dalam hal ini. Saat ini, keikutsertaan wanita dalam bidang politik memang sangat diperlukan untuk menunjang program pembangunan. Wanita dalam kedudukannya sebagai warga negara memang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria untuk ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti ikut dalam pemilihan umum, menjadi anggota organisasi, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun kegiatan politik lainnya.

Penelitian ini menekankan pada partisipasi politik wanita dalam pemilu legislatif sebab pada pemilu tahun 2004 ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya di mana setiap partai politik peserta pemilu diwajibkan melibatkan peran wanita didalamnya, dan terdapatnya batasan minimal jumlah wanita sebagai calon anggota legislatif yaitu minimal kuota tigapuluh persen

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wirobrajan sebab dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis bahwa masih terdapatnya wanita di Kelurahan ini yang memiliki hak pilih dan terdaftar menjadi pemilih namun tidak menggunakan haknya pada pemilu legislatif tahun 2004. Hal ini didasarkan atas fenomena yang terjadi dilapangan, didapatkan bahwa banyak wanita yang tidak memilih pada pemilu legilatif tahun 2004. Dari 7.512 suara pemilih di Kelurahan Wirobrajan hanya 5.987 orang yang menggunakan hak pilihnya. Atau dapat

---

<sup>7</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, Bumi Aksara, Jakarta 1984, hal 304

dikatakan tingkat golputnya mencapai 20 persen. Dan diantara 20 persen yang memilih golput termasuk didalamnya adalah wanita.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, diketahui bahwa komposisi penduduk di Kelurahan Wirobrajan dengan tingkat pendidikan SLTA adalah sebesar 33,58%, di tingkat akademi dan perguruan tinggi 17,57%. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran penduduk untuk mengenyam pendidikan di kelurahan ini cukup tinggi. Selain itu terdapatnya berbagai macam organisasi baik organisasi kemasyarakatan seperti dasawisma dan PKK maupun organisasi politik semakin memudahkan wanita di kelurahan ini mendapatkan berbagai pengetahuan yang diinginkan serta kemudahan dalam mendapatkan akses informasi tentang pemilu.

Banyak prediksi dan hasil poling menyebutkan bahwa pada pemilu tahun 2004 ini, tingkat golput tertinggi berasal dari mahasiswa. Hal ini terlihat dari hasil poling yang dilakukan oleh badan eksekutif mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang menyebutkan bahwa 60 persen mahasiswa memilih golput. Begitu pula hasil poling yang dilakukan oleh badan eksekutif mahasiswa UGM yang hasilnya tidak jauh berbeda. Mereka memilih golput sebab mereka tidak percaya akan kinerja pemerintahan yang akan datang dalam memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mereka juga menganggap bahwa banyak partai yang tetap mempertahankan status quo. Untuk itulah penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wirobrajan sebab daerah ini merupakan daerah yang cukup strategis mengingat posisinya dekat dengan beberapa universitas swasta yang cukup

ternama di Yogyakarta, antara lain: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas PGRI..

Penelitian ini akan memfokuskan “Mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman berorganisasi wanita di Kelurahan Wirobrajan dengan partisipasi politiknya pada pemilihan umum legislatif tahun 2004”,

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Berorganisasi Wanita Terhadap Tingkat Partisipasi Politiknya Pada Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif tahun 2004 di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Daerah Istimewa Yogyakarta?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wanita terhadap partisipasi politiknya dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2004 di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Untuk mengetahui pengaruh pengalaman berorganisasi wanita terhadap partisipasi politiknya dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2004 di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk khasanah ilmu pengetahuan sosial dan ilmu politik, khususnya untuk kajian partisipasi politik wanita.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pusat studi wanita, Departemen Peranan Wanita, Lembaga Kajian Wanita dan semua organisasi kewanitaan serta semua pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan menyangkut partisipasi politik masyarakat, khususnya mengenai partisipasi politik wanita.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Teori dalam penelitian ini sangat penting, disini teori dimaksudkan untuk menyatakan hubungan antara fenomena yang akan diteliti, sehingga aktifitas menjadi jelas.

##### **Definisi Teori**

Untuk menjelaskan teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi teori.

a. Menurut Sofyan Effendi, sebagai berikut:

“Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alamiah yang hendak diteliti. Teori adalah rangkaian logis dari satu proposisi atau lebih”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sofyan Effendi dan Marsi Singarumbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1984., hal 181

b. Menurut Koentjoroningrat:

“Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.<sup>9</sup>

### 1. Tingkat Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah penting yang akhir-akhir ini cenderung banyak dipelajari terutama dalam kaitannya dengan perkembangan demokrasi di negara-negara berkembang.

Di setiap negara yang menganut paham, demokrasi dalam kehidupannya pasti ada partisipasi politik warga negaranya.

a. Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah:

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Kegiatan ini di maksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilu.<sup>10</sup>

b. Menurut Miriam Boediarjo yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah:

“Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pemimpin-pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum”.<sup>11</sup>

c. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menyatakan bahwa:

“Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan anggota masyarakat atau warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta 1991, hal 11

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal 142

<sup>11</sup> Miriam Boediarjo, *Op.Cit*, PT Gramedia, Jakarta, 1982, hal 185.

<sup>12</sup> Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 12

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu bentuk kegiatan dalam kehidupan politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kapasitasnya sebagai warga negara, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi hasil dari proses pemilihan dan pembuatan keputusan politik.

Bentuk-bentuk partisipasi politik banyak dikemukakan oleh banyak ahli diantaranya Miriam Budiardjo mengatakan bahwa:

Partisipasi politik menyangkut: memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.<sup>13</sup>

Pengertian ini tidak membedakan apakah kegiatan politik yang oleh warga negara itu dilakukan atas dasar keinginannya sendiri (otonom) atau digerakkan oleh pihak tertentu (dimobilisir).

Berkenaan dengan partisipasi politik ini, ada ahli lain yang berpandangan bahwa yang termasuk dalam konteks kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan-kegiatan politik yang bersifat otonom saja, sedangkan kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan karena adanya pergerakan atau mobilisasi politik tidak dapat disebut sebagai bentuk partisipasi politik karena hal tersebut terjadi bukan karena adanya kesadaran atau keyakinan warga negara akan kemampuannya sendiri.

Pengertian seperti itu terlihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Herbert Mc. Closky seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo yang menyatakan

---

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hal 6

bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>14</sup>

Dari pendapat tersebut secara tegas menghendaki adanya pemisahan antara bentuk-bentuk kegiatan politik warga negara yang bersifat otonom dengan digerakkan atau di mobilisir untuk memahami pengertian dari partisipasi politik. Namun demikian, pengalaman dari beberapa sarjana yang mempelajari partisipasi politik di negara-negara komunis dan negara-negara sedang berkembang menunjukkan adanya kecenderungan untuk tidak mengadakan pemisahan antara kedua bentuk kegiatan politik tersebut. Karenanya ternyata sulit sekali untuk membedakan antara kegiatan politik yang benar-benar otonom dengan kegiatan politik yang dilakukan karena adanya paksaan terselubung (mobilisasi) dari pihak penguasa atau pihak-pihak lainnya. Munculnya kesukaran tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang budaya dan kehidupan politik negara-negara komunis dan sedang berkembang di satu pihak dengan negara-negara barat di pihak lain sebagai tempat lahirnya konsep partisipasi politik.

Sehubungan dengan hal itu, Robert P. Clark menyatakan bahwa di negara-negara berkembang, partisipasi politik yang digerakkan dapat saja berubah menjadi kegiatan yang bersifat otonom. Hal ini menjadi mungkin karena pengaruh dari perilaku politiknya atau memang pada awalnya kegiatan politik tersebut

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Ibid.*, hal 185



digerakkan, namun kemudian berkembang sehingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang otonom oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam hubungannya dengan kehidupan politik di Indonesia, penulis pun menyadari bahwa sulit untuk memastikan apakah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu didasarkan atas keinginan sendiri atautkah terjadi karena ada paksaan terselubung atau digerakkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini seseorang dianggap telah berpartisipasi politik apabila ia melakukan kegiatan politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemilihan pemimpin dan pembuatan keputusan pemerintah, terlepas kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela atau tidak.

Tidak dilakukannya pemisahan bentuk partisipasi politik yang otonom dengan mobilisasi tersebut juga didasari alasan yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson berikut ini:<sup>15</sup>

- 1 Perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip, tetapi tidak pada aspek realitas, secara realitas keduanya sulit didikotomikan, satu dari kutub A dan satunya lagi dari kutub B. Dalam banyak kasus yang terjadi, perbedaannya justru terletak dibatas keduanya yang relatif terbatas. Selain batas keduanya yang kabur, kriteria pembedaannya juga tidak jelas.
- 2 Dapat dikatakan bahwa hampir semua sistem politik mengandung campuran antara partisipasi politik otonom dan yang dimobilisasi. Persoalannya adalah pada aspek kadar partisipasinya, bukan saja pada

---

<sup>15</sup> Samuel Hunhtington dan Joan Nelson, *Ibid*, hal 14-16

aspek individu, melainkan juga pada sistem politiknya. Tetapi jangan salah menilai bahwa partisipasi politik hanya terdapat pada sistem politik yang tidak otoriter. Didalam sistem politik yang otoriter pun terdapat partisipasi politik, hanya saja kadarnya yang berbeda, serta cara-cara untuk mengaktualisasikannya tidak harus sama dengan di negara-negara dengan system demokrasi.

- 3 Perlu disadari bahwa kedua kategori partisipasi itu bukannya tidak memiliki hubungan tetapi justru memiliki hubungan yang dinamis. Tingkah laku yang awalnya dapat dikategorikan dalam bentuk perilaku partisipasi yang dimobilisasikan, lambat laun dapat berubah menjadi otonom karena masyarakat semakin sadar akan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya dalam bidang politik. Sebaliknya, dari awalnya merupakan partisipasi yang otonom karena adanya keinginan pemerintah atau pemimpin politik untuk mendukung kepentingan politiknya dilakukanlah proses manipulasi dan mobilisasi partisipasi politik.
- 4 Keduanya mempunyai konsekuensi yang sama pentingnya dalam sistem politik. Terdapat konsekuensi-konsekuensi yang relatif sama antara pemimpin yang didukung oleh partisipasi yang otonom maupun yang dimobilisasi. Dengan kata lain, tidaklah tepat untuk menyatakan seorang pelaku politik yang dimobilisasi, berbeda dengan yang otonom dalam hal partisipasi politiknya.

Atas dasar uraian-uraian tentang partisipasi politik tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan lebih memusatkan perhatian pada partisipasi politik anggota masyarakat khususnya wanita dalam pemilihan umum.

Dengan mendasarkan diri pada pendapat yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson dapat dinyatakan bahwa dalam kaitannya dengan partisipasi politik, jenis-jenis tindakan atau perilaku politik yang tergolong dalam bentuk partisipasi pemilihan adalah:

- 1 Kegiatan pemilihan mencakup suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang bertujuan mempengaruhi hasil perolehan suara.
- 2 Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok-kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh yang jelas adalah menimbulkan dukungan bagi atau posisi terhadap suatu usul atau keputusan administrasi tertentu.
- 3 Kegiatan orang yang menyangkut partisipasi anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Orang yang demikian dapat memuaskannya usaha-usahnya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam, menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada dirinya sendiri sudah merupakan bentuk partisipasi politik tidak

perduli apakah orang tersebut ikut atau tidak dalam upaya-upaya orang itu untuk mempengaruhi pemerintah. Keanggotaan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain.

- 4 Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- 5 Tindakan kekuasaan juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik yaitu sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.<sup>16</sup>

## 2. Pemilihan Umum

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah:

“Sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi Pancasila dalam Negara Republik Indonesia dengan mengadakan pemungutan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang mutlak dilaksanakan di wilayah Indonesia, dilakukan setiap lima tahun sekali”.

Menurut M. Rusli Karim, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah:

“Sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada asarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, sehingga membentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, menurut sistem permusyawaratan/perwakilan”.<sup>17</sup>

Bertolak dari kedua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pemilihan umum berfungsi sebagai sarana pembentukan kekuasaan negara atas dasar

---

<sup>16</sup> Miriam Budiarto, *Op.Cit*, hal 16-18

<sup>17</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, ha2

keinginan rakyat. Dilaksanakannya pemilihan umum di suatu negara menunjukkan bahwa negara yang bersangkutan mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sehingga hanya rakyat pula yang berhak untuk membentuk kekuasaan negara.

Pembentukan sistem kekuasaan berdasarkan keinginan rakyat tersebut diwujudkan dengan cara memilih dan menentukan orang-orang atau organisasi politik tertentu untuk mewakili rakyat dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan Negara. Pemilihan umum merupakan suatu proses kegiatan untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

### **3. Pendidikan**

#### **a. Pengertian Pendidikan**

Secara definitif banyak ahli yang mendefinisikan tentang pendidikan diantaranya Syarif Tayeb, Mashuri, Kartini Kartono serta Poerbakawatja dan Harahap.

Syarif Tayeb mendefinisikan pendidikan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan secara sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia yang diinginkan”.<sup>18</sup>

Menurut Mashuri pengertian pendidikan adalah sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sadar demi pembinaan keperibadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia jasmani dan rohani dalam keluarga, sekolah, masyarakat dalam rangka pembangunan persatuan bangsa Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berazaskan Pancasila”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Syarif Tayeb, *Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Bangsa*, Departemen P dan K, Jakarta, 1976, hal 34

<sup>19</sup> Mashuri, *Kebijaksanaan dan Langkah Pendidikan*, Departemen P dan K, 1973, hal 15

Kartini Kartono yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis dan internasional dibantu oleh metode dan teknik ilmiah diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu.”<sup>20</sup>

Poerbakawatja dan Harahap menyebutkan bahwa:

“Pendidikan merupakan usaha sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggungjawab moral dari segala perbuatannya.....

Orang dewasa itu adalah orang tua anak atau orang yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik. Seperti: guru sekolah, kiai dalam lingkungan keagamaan, kepala asrama, dll”<sup>21</sup>

Dari definisi diatas maka pendidikan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan manusia secara sadar, sistematis, etis, kreatif dengan teknik dan metode yang ilmiah untuk memperluas pengetahuannya tentang dunia dimana mereka hidup sehingga mampu berperan dimasa yang akan datang. Adapun proses pendidikan tersebut tercermin:

1. Adanya objek, yaitu peserta didik yang dituntut perkembangan, lahir batinnya serta pengetahuan dan keterampilan.
2. Adanya tujuan, yaitu mendewasakan pikiran peserta didik sehingga mampu melakukan fungsinya dengan baik.
3. Adanya cara atau metode tertentu yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan.

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung 1980, Hal 6

<sup>21</sup> Muhibbin Syah, M.Ed, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung 2003, hal 11

Dalam dunia pendidikan jenis pendidikan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

## 1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal menurut Sanapiah Faisal adalah sebagai berikut:

“Pendidikan yang bentuknya telah terstruktur secara hirarkis, bentuk-bentuk secara kronologis dalam masalah pendidikan.

Contohnya: Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMU, Akademik dan Perguruan Tinggi”.<sup>22</sup>

Selanjutnya menurut Noeng Muhadjir, pendidikan formal diartikan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah pendidikan yang terstruktur mengenai umur waktu dan aturan. Pendidikan formal mempunyai kurikulum standar akademi serta sistem ujian yang relatif ketat”.<sup>23</sup>

Dari pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai struktur yang jelas, memiliki aturan yang ketat dan berstruktur tingkatannya serta memiliki pengelolaan pendidikan yang teratur. Dan telah diatur oleh pemerintah dan menjadi tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraannya.

## 2. Pendidikan Non formal

Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang penyelenggaraannya dilakukan di luar pendidikan formal. Sifatnya tidak terlalu ketat dalam peraturan dan pembantuan sangsi yang jelas. Isi pendidikannya bersifat sebagai penunjang kekurangan dari sistem pendidikan yang telah ada terutama untuk menambah keterampilan dari peserta didik.

---

<sup>22</sup> Sanapiah Faisal, *Pendidikan Luar Sekolah dan Dalam Pendidikan dan Pembangunan Nasional*, Usaha Nasioal, Surabaya, 1981, hal 51.

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Pendidikan Sosial*, Yayasan Pendidikan Paramita, Yogyakarta, 1977, hal 22.

Menurut Sanapiah, pengertian pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

Pendidikan non formal adalah sebagai penyelenggara pendidikan persekolahan, isi pendidikannya terprogram, ada konsekuensi materi dan interaksi belajar yang sedikit banyak terkontrol serta adanya kredensial, meskipun tidak selalu memiliki sangsi legal”.<sup>24</sup>

### 3. Pendidikan Informal

Secara umum pendidikan informal diartikan sebagai pendidikan yang diperoleh manusia sejak ia dilahirkan sampai kematiannya dan dilakukan dengan sadar, karenanya pendidikan ini penting untuk lebih mengenal diri dan lingkungan serta mampu beradaptasi. Pendidikan ini juga akan menempa manusia dalam menghadapi segala tantangan hidup.

Lebih lanjut Sanapiah, mengatakan yang dimaksud pendidikan informal adalah sebagai berikut:

“Segala macam penyelenggaraan aktifitas melembaga yang fungsi pendidikannya berlangsung secara wajar dan lebih bersifat sebagai pengalaman individual mandiri dan tidak kredensial nilai”.<sup>25</sup>

Dari pihak lain St Vembriarto mengatakan:

“Pendidikan yang diperoleh seseorang dengan tidak sadar sejak ia lahir sampai mati didalam keluarga, dalam pekerjaan dan dalam pergaulan”.<sup>26</sup>

#### **b. Tingkat Pendidikan**

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat 1 menyebutkan:

“Jenjang pendidikan termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, menengah, pendidikan atas/tinggi”.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Sanapiah Faisal, *Op Cit*, hal 52

<sup>26</sup> St.Vembriarto, *Op Cit*, hal 22



Sedangkan dalam pasal 13 ayat 1 menyebutkan:

“Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.”

Adapun dalam pasal tersebut yang dimaksudkan pendidikan dasar yaitu:

“Pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun disekolah dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat.”

Dalam pasal 15 ayat 1 menyebutkan:

“Pendidikan menengah diselenggarakan untuk memperluas dan melanjutkan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social budaya dan atau serta dapat mengembangkan kemampnan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.”

Dalam pasal 15 ayat 1 tersebut yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah: “pendidikan yang lamanya 3 (tiga) tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan disekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat.”

Pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan:

“Pendidikan tinggi yang merupakan lanjutan pendidikan tingkat menengah diselenggarakan untuk menciptakan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian. Dari ketentuan yang termuat pada pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa pendidikan tinggi adalah tahapan lanjutan dari pendidikan menengah yang diharapkan mampu menghasilkan manusia yang berkualitas dan professional”.

Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 2 disebutkan:

“Satuan pendidikan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi dan dapat dibentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas”.

Selaras dengan pengertian diatas mengenai tingkat pendidikan atau pendidikan formal yang dapat ditempuh seseorang, M. Nashir menyatakan bahwa pada dasarnya tahap pendidikan dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Tingkat pendidikan yang ditempuh pada usia enam sampai duabelas tahun.  
Pada tahap ini seseorang mulai memasuki dunia SD atau sederajat. Ia atau seseorang tersebut memasuki kehidupan belajar atau mulailah ia mempelajari hal-hal yang riil yang dibutuhkan dalam kehidupannya.
2. Tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang pada usia tigabelas tahun sampai usia belapanbelas tahun. Pada usia ini seseorang telah memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah lanjutan tingkat atas. Pada tahap ini seseorang dengan bekal yang telah ia dapatkan sebelumnya, mulailah belajar untuk menjadi individu-individu ditengah-tengah masyarakat dan biasanya disertai emosi dan semangat. Pada tahap ini disebut tingkat pembentukan emosi dan nafsu.
3. Tingkat pendidikan yang ditempuh pada usia delapan belas tahun ke atas.  
Pada tahap ini seseorang belajar hidup sendiri guna mempersiapkan diri dalam hidupnya. Dan pada tingkat pendidikan ini disebut dengan tingkat pembentukan autodidact.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tingkat pendidikan adalah tahapan-tahapan tertentu dimana seseorang memperoleh pendidikan yang diperlukannya.

Tingkat pendidikan ini dimulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan adalah suatu proses pendidikan yang dilalui seseorang pada tahapan-tahapan tertentu.

### **c. Tujuan pendidikan**

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudipekerti luhur, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan kebangsaan.”

Sedangkan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Syamsi adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari pendidikan adalah untuk membina manusia agar menjadi berkepribadian berdasarkan akan kebutuhan berkesadaran, bermasyarakat dan berkemampuan membudayakan alam”.<sup>27</sup>

Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Dengan demikian pendidikan nasional bertujuan mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

---

<sup>27</sup> Ibnu Syamsi, *Ensiklopedi Umum dan Pembangunan*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1986

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dalam pembangunan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreatifitas dan menumbuhkan atau menyuburkan sikap demokratis dan bertanggungjawab, tenggang rasa, berbudi pekerti luhur dalam pelaksanaan pembangunan bagi bangsa dan negara.

Dengan pengertian diatas maka terlihat dengan jelas pentingnya pendidikan, karena dengan pendidikan akan membawa manusia kearah yang lebih baik atau maju. Atau dengan kata lain dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan cenderung semakin baik dan maju.

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka tingkat pendidikan diukur dari pendidikan formalnya:

1. Tingkat pendidikan rendah (SD dan SLTP atau yang sederajat)
2. Tingkat pendidikan menengah (SLTA atau yang sederajat)
3. Tingkat pendidikan tinggi (Akademik, Universitas atau yang sederajat)

#### **4. Pengalaman Berorganisasi**

##### **a Pengertian organisasi**

Secara definitif banyak ahli yang mendefinisikan tentang organisasi diantaranya Bernard, Etzioni, dan Soewarno Handjaningrat

Bernard merumuskan pengertian organisasi sebagai:

“Suatu sistem yang secara sadar mengkoordinasikan kegiatan dari dua orang atau lebih”.

Etzioni mengatakan bahwa:

“Organisasi adalah unit-unit yang terencana, dibentuk dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu.

Soewarno Handjaningrat, mengatakan organisasi dapat diartikan sebagai:

“Wadah atau kerangka untuk mencapai tujuan, dan merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia modern”<sup>28</sup> Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam urusan mencapai tujuan. Dalam organisasi ini sudah dibentuk susunan dan prosedur kerja yang jelas yang biasanya ditandai dengan ditunjuknya seseorang pemimpin dalam organisasi tersebut.

Dalam kamus manajemen terdapat banyak pengertian organisasi antara lain:

“Organisasi merupakan proses menentukan dan mengelompokkan pekerjaan yang akan diselesaikan, merumuskan dan mendelegasikan tanggungjawab dan kekuasaan dalam membentuk hubungan untuk tujuan memungkinkan orang-orang bekerjasama paling efektif dalam mencapai tujuan.”<sup>29</sup>

“Organisasi juga diartikan sebagai suatu proses, dengan mana orang-orang dapat bekerjasama kearah pencapaian tujuan-tujuan kelompok.”<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Max Weber organisasi dibedakan menjadi dua yaitu:”Organisasi asosiatif yang merupakan organisasi patembayan yang mana hubungan warganya satu sama lain atas dasar pamrih. Dan organisasi sosial, yang bersifat paguyuban dengan hubungan yang bukan pamrih.”<sup>31</sup>

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa organisasi sosial memiliki proses yang dinamis. Pola-pola antar hubungan manusia didalamnya senantiasa mengalami perubahan, walaupun pada kenyataannya pola tersebut tetap bersifat teratur dan dapat diramalkan. Tindakan masing-masing orang terhadap lainnya senantiasa

---

<sup>28</sup> Ulung Pribadi, *Diklat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi Publik*, UMY, 2002, hal 3

<sup>29</sup> Drs. Moekijat, *Kamus Manajemen*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 357

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Ulung Pribadi, *Op.Cit*

serupa berulang-ulang dan terkoordinasi. Hal itu terjadi melalui proses mengorientasikan tindakan masing-masing dengan orang-orang lainnya.

Dengan demikian maka organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan adanya organisasi mereka dapat bertindak dengan baik sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku dan dengan organisasi kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengetahuan secara lebih dapat terpenuhi.

#### **b. Dasar Dalam Kehidupan Berorganisasi**

Yang menjadi dasar atau landasan dalam kehidupan berorganisasi adalah apa yang menjadi tugas dari organisasi itu, dan tugas dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Adapun sasaran organisasi dapat dirumuskan sebagai keadaan yang diinginkan yang realisasinya diusahakan oleh organisasi <sup>32</sup>

Mereka bertugas dalam menjalankan perannya sesuai dengan kedudukan atau status mereka dalam struktur organisasi tersebut. Bagaimana tugas-tugas tersebut dilakukan secara terpola sehingga terbentuk pola tindakan dari organisasi yang menjalankan tugas tersebut sehingga akan menjadikan suatu pengalaman pada diri mereka masing-masing.

Bernard, dengan model teori Motif Kontribusinya menyatakan bahwa seseorang cenderung ikut serta dalam kegiatan organisasi hanya terbatas pada anggapan bahwa imbalan (dorongan untuk bekerja) yang mereka terima sebanding dengan usaha (kontribusi) mereka. <sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Drs. Moekijat, *Op. Cit.*, hal 21

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 19

Anggota organisasi yang memiliki kedudukan yang berbeda akan membawa konsekuensi pada keikutsertaan atau keaktifan untuk terlibat dalam organisasi tersebut sehingga hal ini akan menjadi suatu pengalaman bagi mereka jika memasuki organisasi lain.

Disamping itu, karena kita selalu hidup dalam organisasi-organisasi yang tidak terbatas pada satu organisasi saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda, maka akan membentuk pola perilaku, sikap dan tindakan yang berbeda dari individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam organisasi antar subsistem akan berinteraksi selalu dan saling mempengaruhi, dengan begitu keberadaan individu dalam organisasi apapun akan selalu memerlukan orang lain. Dengan demikian maka kedudukan, keaktifan serta jumlah organisasi yang diikuti menjadi satu kesatuan pengalaman masing-masing anggota organisasi untuk masuk dalam kehidupan organisasi lain seperti keluarga yang merupakan organisasi awal dari setiap individu.

Dari uraian tersebut diatas, pengalaman berorganisasi yang dimaksud adalah semua aktivitas yang pernah dilakukan dalam organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan yang meliputi organisasi politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Baik yang pernah diikuti ataupun yang masih aktif diikuti.

Dalam penelitian ini pengalaman organisasi diukur berdasarkan:

1. Kuantitas pengalaman berorganisasi yaitu: jumlah organisasi yang diikuti.
2. Kualitas pengalaman berorganisasi, yang meliputi:

- Kedudukan dalam berorganisasi, seperti: menjadi pengurus (ketua, sekretaris, bendahara), seksi-seksi atau anggota.
  - Keaktifan dalam organisasi, seperti: terlibat ikut kegiatan-kegiatan rapat, menjadi panitia, memberi sumbangan materi dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
- 3 Pengalaman dalam berorganisasi dikaji sejak SLTP, baik yang pernah diikuti maupun organisasi yang masih aktif.

#### **5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Wanita Terhadap Partisipasi Politikanya dalam PEMILU**

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh individu dalam rangka meningkatkan kemampuan berfikir dan menambah pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sekitarnya dimana individu berada.

Menurut Siti Meichati, Pendidikan dalam arti luas tidak saja meliputi pendidikan dalam arti formal tetapi juga pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diberikan suatu institusi yang teratur yang dimaksudkan untuk melanjutkan/melaksanakan warisan sosial budaya. Pendidikan informal yang diluar institusi terdapat dalam keluarga, diluar rumah, dan pergaulan. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan adalah pendidikan formal mulai dari tingkat dasar (SD), tingkat menengah (SLTP/SLTA), dan tingkat tinggi (Perguruan Tinggi), dalam hubungannya dengan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.



Selain itu Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa;

“Pendapatan (income), pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain, orang yang pendapatannya tinggi, yang berpendidikan baik dan berstatus sosial tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah<sup>34</sup> .

Selanjutnya Maswadi Rauf dalam jurnal ilmu politik mengutarakan bahwa dalam ilmu politik mengutarakan bahwa para ilmuwan barat (tingkat status sosial, ekonomi tinggi pendidikan dan penghasilan) menjadi persyaratan bagi terciptanya tingkat partisipasi yang tinggi. Pandangan diatas didasarkan atas alur pemikiran bahwa: mereka yang berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan informasi lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah atau tidak sekolah.<sup>35</sup>

Dengan metode tersebut mereka yang berpendidikan tinggi lebih memahami makna politik sehingga cenderung terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir ilmiah.

Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara obyektif yang akan dapat memberikan baginya kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan zaman atau tidak .

Dengan begitu maka pendidikan menjadikan seseorang semakin matang dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Sehingga dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan membuat wanita semakin mampu berperan dalam kegiatan-kegiatan politik, serta menyalurkan partisipasi politiknya dalam pemilihan umum.

---

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hal 8

<sup>35</sup> Maswadi Rauf, *Jurnal Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta,1999, hal 7.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa tingkat pendidikan wanita mempunyai hubungan yang erat dengan partisipasi politiknya dalam kegiatan pemilu, dimana pada wanita dengan tingkat pendidikan yang berbeda terdapat jenis-jenis partisipasi dalam pemilu yang berbeda pula dan pada akhirnya partisipasi politiknya dalam kegiatan pemilu secara keseluruhan juga akan berbeda. Ada pun kecenderungannya adalah wanita yang berpendidikan rendah. Wanita yang berpendidikan rendah partisipasinya dalam kegiatan pemilu lebih kecil daripada wanita yang berpendidikan sedang dan tinggi.

#### **6. Pengaruh Pengalaman Berorganisasi Wanita Terhadap Partisipasi Politik dalam PEMILU**

Organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan adanya organisasi mereka dapat bertindak dengan baik sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku dan dengan organisasi kebutuhan-kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Anggota organisasi yang memiliki kedudukan yang berbeda akan membawa konsekuensi pada keikutsertaan atau keaktifan untuk terlibat dalam organisasi tersebut yang mana ini akan terjadi suatu pengalaman bagi mereka jika memasuki organisasi lain.

Keanggotaan seseorang dalam organisasi, yang tidak terbatas hanya pada satu organisasi saja bisa lebih, dimana antar individu dan organisasi yang satu dengan yang lain memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda, maka akan membentuk pola perilaku, sikap dan tindakan yang berbeda dari individu-individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Joann Woodward yang dikutip oleh Azhar kasim mengatakan organisasi merupakan “Subsistem dari lingkungannya, artinya diluar organisasi terdapat subsistem (seperti sistem politik, ekonomi, industri dan lainnya termasuk keluarga). Dan antar subsistem akan berinteraksi selalu dan saling mempengaruhi, dengan begitu keberadaan individu dalam organisasi apapun akan selalu memerlukan orang lain.

Dengan begitu maka dari kedudukan, keaktifan serta jumlah organisasi yang diikuti menjadi satu kesatuan pengalaman masing-masing anggota organisasi untuk masuk kedalam kehidupan berorganisasi yang lain seperti halnya organisasi politik.

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh wanita dalam berorganisasi baik itu organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kenegaraan yang meliputi organisasi politik, sosial, ekonomi dan lain-lainnya akan membuka cakrawala berfikir seseorang sehingga mereka akan lebih mengaktualisasikan perannya dalam bidang tertentu dalam hal ini partisipasi politiknya.

## **7. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Berorganisasi Terhadap Partisipasi Politik dalam PEMILU**

Menurut Gabriel Almond mengungkapkan bahwa apa yang dicapai di bidang pendidikan nampaknya mempunyai pengaruh terhadap sikap politiknya. Orang dengan tingkat pendidikan rendah atau orang yang mendapat pendidikan terbatas adalah aktor politik yang berbeda dengan orang yang telah mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984, hal 513

Selanjutnya diungkapkan pula bahwa: Dalam setiap negara, rupanya kelompok masyarakat terdidik memiliki kunci menuju partisipasi politik dan keterlibatan dalam politik, sementara mereka dengan status pendidikan yang rendah kurang diperlengkapi dengan baik. Di setiap Negara kelas terdidik lebih mungkin sadar akan politik (sadar akan pengaruh pemerintah, menerima informasi tentang pemerintahan, mengikuti politik lewat berbagai media); mempunyai pendapat politik tentang sejumlah besar subyek; dan terlihat dalam pembahasan politik. Orang dengan pendidikan lebih tinggi pun lebih mungkin memandang dirinya berkompeten mempengaruhi pemerintah dan bebas terlibat dalam diskusi politik.

Dan urusan tersebut diatas, terlihat bahwa terdapat hubungan antar tingkat pendidikan dengan partisipasi politik seseorang. Disimpulkan sebagai berikut: Individu yang terdidik, dalam arti tertentu, siap sedia untuk berpartisipasi politik.

Pendidikan bukan saja meningkatkan partisipasi politik, tetapi ia pun menempatkan individu dalam satu situasi organisasi yang selanjutnya akan mempertinggi kadar partisipasinya.

Almond mengemukakan bahwa: pendidikan mempunyai pengaruh majemuk terhadap kompetensi politik. Bukan saja individu dengan pendidikan lebih tinggi di sekolah mempelajari keterampilan yang relevan di bidang politik, tetapi ia pun lebih mungkin memasuki hubungan non politik yang meningkatkan kadar kompetensi politiknya. Keanggotaan perserikatan merupakan salah satu

bentuk partisipasi non politik itu. Dengan demikian keanggotaan pada organisasi non politik pun akan mempengaruhi sikap politik seseorang.<sup>37</sup>

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa: kompetensi subyektif dan frekuensi keanggotaan dalam organisasi berkaitan dengan tingkat pencapaian pendidikan, dengan demikian penting untuk dicatat bahwa hubungan antara keanggotaan dan perasaan mampu mempengaruhi pemerintah ini tetap bertahan jika derajat pendidikan dijaga agar tetap konstan.

Dengan kata lain tingkat pendidikan seseorang mempunyai hubungan pula terhadap pengalaman berorganisasi atau keikutsertaan seseorang dalam suatu organisasi. Organisasi yang memberi kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi aktif mungkin sama pentingnya bagi perkembangan kewarganegaraan demokratis seperti halnya organisasi sukarela pada umumnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dapat mengarahkan seseorang secara sadar untuk terlibat dalam suatu kegiatan organisasi.

Individu yang pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di bidang non politik seperti dalam suatu organisasi, dibandingkan dengan seseorang yang tak pernah memiliki kesempatan ini, akan lebih mungkin memilih tanggapan partisipasi jika timbul situasi politik dimana tersedia sedikit kemungkinan untuk ikut ambil bagian.

Pengalaman non politik sebagaimana halnya pengalaman berorganisasinya, peranan aktif di dunia politik dan menambah kemungkinan bahwa ia akan percaya kepada pengaruh politiknya

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 304

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Tingkat pendidikan yang dimaksud disini adalah suatu jenjang atau tahapan-tahapan tertentu dimana seseorang memperoleh pendidikan yang diperlukannya, mulai dari tingkat pendidikan paling rendah sampai dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi .
2. Pengalaman berorganisasi yang dimaksud disini adalah pengalaman yang didapat oleh wanita dalam mengikuti atau melakukan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan yang meliputi organisasi-organisasi politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Yang dilihat dalam penelitian ini adalah kualitas dan kuantitas keterlibatan wanita dalam organisasi.
3. Partisipasi politik dalam penelitian ini mengkhususkan pada partisipasi politik wanita dalam pemilihan umum legislatif tahun 2004 yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh wanita dalam pemilihan umum legislatif tahun 2004, yang mana tingkat keikutsertaan antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan diartikan sebagai tahapan-tahapan pengetahuan yang dilalui responden yang ditandai ijazah terakhir yang dimiliki.

Adapun indikator tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tingkat pendidikan rendah, SD dan SLTP atau yang sederajat yang didasarkan pada ijazah terakhir.
- Tingkat pendidikan sedang atau menengah, SLTA atau SMK dan yang sederajat didasarkan pada ijazah terakhir.
- Tingkat pendidikan tinggi, Perguruan tinggi / Akademi atau yang sederajat berdasarkan pada ijazah terakhir.

## 2. Pengalaman berorganisasi

Pengalaman berorganisasi diartikan sebagai suatu keadaan yang telah dirasakan dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu organisasi.

Indikator-indikator pengalaman berorganisasi tersebut antara lain:

- a. Kuantitas pengalaman berorganisasi yaitu jumlah organisasi yang diikuti, yang meliputi:
  - Organisasi yang pernah diikuti, serta;
  - Organisasi yang masih aktif diikuti.
- b. Kualitas pengalaman berorganisasi, yang meliputi:
  - Keaktifan dalam melakukan tugas atau program organisasi, seperti: terlibat ikut kegiatan-kegiatan rapat, menjadi panitia, memberi sumbangan materi untuk kepentingan organisasi.
  - Posisi atau kedudukan dalam organisasi.

### 3. Partisipasi politik wanita dalam pemilihan umum tahun 2004

Tingkat partisipasi politik wanita dalam pemilihan umum tahun 2004, akan dinilai berdasarkan keterlibatan atau keikutsertaan wanita dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dalam proses pemilihan umum, yaitu:

- a. Kampanye pemilihan umum, yang meliputi: frekuensi keikutsertaan dalam kampanye massal (monologis), keikutsertaan dalam kampanye-kampanye yang berbentuk dialogis, keterlibatan secara langsung dalam persiapan dan pelaksanaan kampanye dari Organisasi Peserta Pemilu, Calon anggota Legislatif (Caleg) .
- b. Keterlibatan dalam usaha-usaha yang bertujuan mencari dukungan dari OPP tertentu, yang meliputi: mengajak pihak lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan OPP atau Caleg tertentu, meyakinkan pihak lain untuk memilih OPP atau Caleg tertentu, penyebaran poster-poster, selebaran-selebaran, spanduk dan brosur kepada umum berisi ajakan untuk mendukung OPP atau Caleg tertentu.
- c. Memberikan bantuan-bantuan baik berupa biaya, tenaga, maupun pikiran kepada OPP tertentu.
- d. Upaya menghubungi panitia pemilihan umum, pejabat pemerintah dan media massa guna menyampaikan aspirasinya tentang proses pemilihan umum.



- e. Menjadi panitia dalam pemilihan umum (PPS, PANWAS, SAKSI) atau sebagai pengawas pemilu.
- f. Pemungutan suara, yang meliputi kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS), pemberian suara.
- g. Mengikuti penghitungan suara

## **F. Hipotesa**

Hipotesa merupakan salah satu unsur penelitian ilmiah yang penting. Mengingat kedudukannya sebagai instrument kerja dan teori. Hipotesa memberikan arah bagi proses penelitian selanjutnya, yang merupakan hasil deduksi dari teori atau proposisi.

Koentjoroningrat mengatakan bahwa:

“Hipotesa merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan antara dua fakta atau lebih dan hipotesa ini masih mempunyai sifat sementara, yang berarti bahwa suatu hipotesa dapat diubah atau diganti dengan hipotesa lain, karena tergantung dari masalah yang diteliti dan teori yang dipakai”.<sup>38</sup>

Bertolak dari rumus diatas, maka dapat dikemukakan adanya model-model hipotesa, yaitu:

### **1. Model Variabel**

#### **a. Hipotesa Mayor**

Adanya pengaruh antara tingkat pendidikan dan pengalaman berorganisasi wanita dengan partisipasinya dalam PEMILU.

---

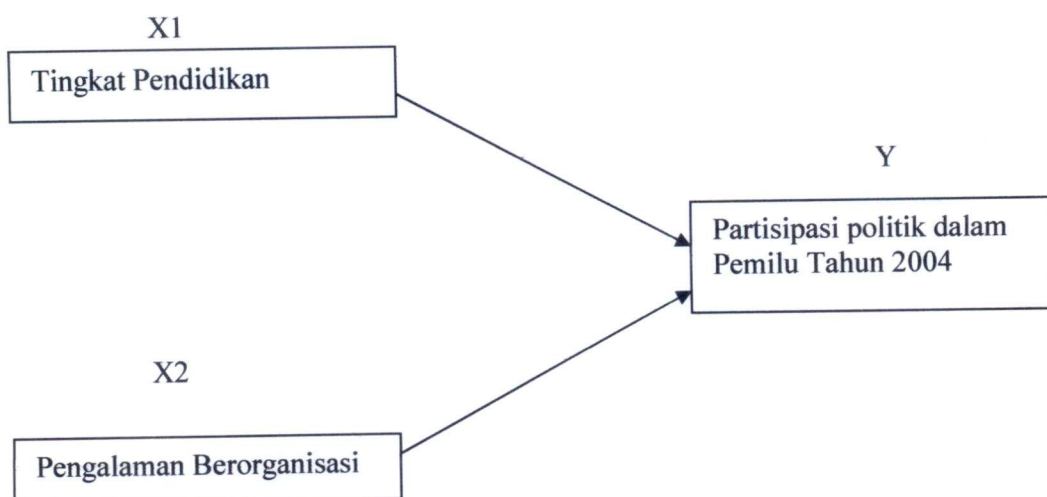
<sup>38</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, 1977, hal 36

d. Hipotesa Minor

- Adanya pengaruh tingkat pendidikan wanita terhadap partisipasinya dalam Pemilihan Umum.
- Adanya pengaruh pengalaman berorganisasi wanita terhadap partisipasinya dalam Pemilihan Umum.

2. Model Geometrik

Yaitu penyusunan hipotesa dengan menggunakan sebuah gambar.



Keterangan:

X1 = Variabel bebas yaitu tingkat pendidikan

X2 = Variabel bebas yaitu pengalaman berorganisasi

Y = Variabel terikat yaitu partisipasi politik dalam Pemilu 2004

**G. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dimana penyusun berusaha mengumpulkan data-data dari

responden dengan teknik sampel yang dijaring melalui questioner yang disebut sebagai data primer, dan penelitian seperti ini adalah penelitian survey, dengan maksud untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman berorganisasi wanita dengan variabel terikat yaitu partisipasi dalam pemilu melalui pegujian hipotesa.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Yaitu data-data yang didapat langsung dari responden atau sampel populasi oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>39</sup> Data primer merupakan data pokok dalam penelitian ini, yang diperoleh langsung oleh responden melalui teknik questioner, interview dan observasi.

### **b. Data Sekunder**

Yaitu data-data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar diri peneliti sendiri.<sup>40</sup> Jadi dengan demikian data sekunder merupakan hasil kesimpulan atau hasil penelitian orang lain biasanya telah tercatat dalam dokumen-dokumen atau arsip-arsip, sehingga untuk memperolehnya digunakan data dokumentasi.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Guna mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Winamo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarista, Jakarta, 1994, hal 163

<sup>40</sup> *Ibid*

### 1. Metode Kuesioner

Yaitu merupakan teknik dalam rangka untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan jawaban tertulis yang diisi oleh obyek penelitian atau responden.<sup>41</sup>

### 2. Dokumentasi

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memakai buku-buku literature sebagai bahan referensi untuk melengkapi teoritisasi, konseptual serta definisi dalam pembuatan laporan akhir.

### 3. Metode Wawancara

Metode ini merupakan metode bantu, yang digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 4. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel bebas (X), terdiri dari:
  - (X1) yaitu tingkat pendidikan
  - (X2) yaitu pengalaman berorganisasi
2. Variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel terikat (Y) yaitu partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2004.

## 5. Populasi dan Sampel

Menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama.<sup>42</sup> Populasi dapat diartikan

---

<sup>41</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978, hal 13

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hal 23

sebagai keseluruhan dari sumber yang diteliti dengan ciri-ciri atau sifat tertentu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kaum wanita di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan DIY, yang pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 telah berusia minimal 17 tahun dan terdaftar sebagai pemilih atau yang telah menikah.

Dipilihnya kaum wanita yang berusia minimal 17 tahun atau yang telah menikah sebagai populasi didasari oleh pertimbangan bahwa mereka sudah pernah menjadi pemilih dan mengalami masa pemilihan umum. Sehingga mereka memiliki pengalaman yang lebih nyata tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dibandingkan dengan wanita pada saat pemilihan umum tahun 2004 berusia kurang dari 17 tahun.

Sedangkan mengenai syarat usia pemilih/hak untuk memilih dalam pemilihan umum menurut UU Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut :

Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk pemilihan umum sudah berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling, dimana masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, yaitu dengan menggunakan sampel 10% dari jumlah penduduk wanita yang telah memiliki hak pilih atau telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, seperti apa yang dikatakan oleh Slovin.

Ukuran sample untuk batas-batas kesalahan dan jumlah populasi yang ditetapkan.<sup>43</sup>

Popualasi	Batas-batas Kesalahan					
	1%	2%	3%	4%	5%	10%
500	*	*	*	*	222	83
1500	*	*	638	441	316	94
2500	*	1250	769	500	345	96
3000	*	1364	811	517	353	97
4000	*	1538	870	541	364	98
5000	*	1667	909	556	370	98
6000	*	1765	938	566	375	98
7500	*	1842	959	574	378	99
8000	*	1905	976	580	381	99
9000	*	1957	989	584	383	99
10000	5000	2000	1000	588	385	99
50000	8333	2381	1087	617	387	100

Adapun jumlah wanita yang berusia 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah yang menjadi populasi dalam penelitian, berdasarkan data yang diperoleh berjumlah 3.724 pemilih. Sesuai dengan ketentuan ukuran sampel untuk batas-batas kesalahan dan jumlah populasi yang telah ditetapkan diatas maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 97 responden.

## 6. Teknik Penentuan Skor

Setelah data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner pada bentuk pertanyaan tertutup, maka tiap jawaban diberi skor 1,2,3 yang berarti bahwa:

- a. Untuk jawaban a diberi nilai 3 (tiga)
- b. Untuk jawaban b diberi nilai 2 (dua)
- c. Untuk jawaban c diberi nilai 1 (satu)

<sup>43</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal 7

kriteria penelitian yang valid, banar dan lengkap, maka diperlukan suatu metode yang valid dalam analisis. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu analisis data dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk angka-angka yang dihasilkan melalui rumus statistik. Dalam penelitian ini untuk mengolah data-data hasil penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi, maka penulis menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

### 1. Koefisien korelasi parsial

Untuk mengetahui kemurnian dari matriks korelasi, atau untuk mengetahui variabel pengaruh antara yang dominan mempengaruhi variabel terpengaruh dengan kontrol pengaruh lainnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

$$r_{ijk} = \frac{r_{ij} - (r_{ik})(r_{kj})}{\sqrt{1 - (r_{ik})^2} \sqrt{1 - (r_{kj})^2}}$$

Keterangan:

$r_{ijk}$  = Korelasi antara Variabel pengaruh (X1) dan variabel terpengaruh (Y) dengan dikontrol (X2)

i = Variabel pengaruh (X1)

j = Variabel terpengaruh (Y)

K = Variabel pengaruh (X2) yang berfungsi sebagai variabel control

Kemudian untuk mengetahui signifikan tidaknya digunakan rumus.<sup>46</sup>

$$Fp = \frac{r^2_{ijk} N - (k + 1)}{1 - r^2 k}$$

<sup>45</sup> AG. Subarsono, *Instrumen Analisa Data Kuantitatif*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1990, hal 27.

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, hal 202

Keterangan:

Fp = test signifikan

N = jumlah sample

k = jumlah variable bebas

N-k-1 = menunjukkan derajat bebas

Jika F test > F table = signifikan

Jika F test < F table = tidak signifikan

## 2. Analisa regresi Ganda

Untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terpengaruh akibat perubahan suatu variabel pengaruh sebesar satu standar deviasi, maka variabel pengaruh lainnya dianggap tetap. Hal ini dapat dinyatakan dalam rumus koefisien regresi ganda sebagai berikut;

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 \dots b_k + x_k^{47}$$

Keterangan:

Y = Skor ramalan dari variabel tergantung atau nilai variabel yang diramalkan oleh variabel bebas.

a = Constan Intercept, dimana  $a = Y - b_x$

$b_1$  = Koefisien korelasi yang berhubungan dengan variabel  $x_1$

$b_2$  = Koefisien korelasi yang berhubungan dengan variabel  $x_2$

Untuk mengetahui tingkat signifikansi digunakan rumus:<sup>48</sup>

$$k = \frac{\text{Regresit Coefisient}}{S \tan \text{dartError Re gresion Coefisient}}$$

## 3. Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus Koefisien determinasi adalah.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Anton Dajan, *Pengantar Metode Sratistik*, Jilid II, LP3ES, Jakarta, 1986, hal 325

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 348



$$R^2 = \frac{SS_{reg}}{SS_1}$$

Keterangan:

R = Koefisien determinasi  
SSreg = jumlah kuadrat regresi  
SSi = total sum of square of y

#### 4. Ketepatan Prediksi

Untuk membuktikan bahwa prediksi yang dilakukan tepat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara membandingkan nilai standar deviation of y (SDy), dengan nilai standar error of estimate (SEest).

Rumus SEest adalah:<sup>50</sup>

$$SEest = \sqrt{\frac{SS_{reg}}{N - k - 1}}$$

Sedangkan untuk rumus SDy adalah:

$$SDy = \sqrt{\frac{y^2}{n}}$$

Kriteria yang digunakan untuk membandingkan nilai SDy dengan SEest sebagai berikut;

Jika  $SDy > SEest$  = Prediksi tepat

Jika  $Sdy < SEest$  = Prediksi tidak tepat

---

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hal 49

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 93